



RENCANA KERJA

SEKRETARIAT MPU ACEH

TAHUN 2022

RANCANGAN AKHIR

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh telah dapat menyelesaikan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 yang merupakan tahapan terakhir yang harus dilakukan untuk melakukan persiapan Penyesuaian dengan Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2022.

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja ini memuat kebijakan, rencana program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh yang mengacu pada Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) serta kebutuhan anggaran pada program/kegiatan berdasarkan RPJMA 2017-2022 serta tugas dan fungsi Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dan juga memperhatikan hasil pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2020 dengan mempertimbangkan isu-isu penting tingkat global, regional, nasional dan daerah khususnya dalam bidang keistimewaan dan kekhususan Aceh.

Dalam penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja ini masih jauh dari kesempurnaan, karena itu sangat dibutuhkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi penyempurnaannya. Akhirnya ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Rencana Kerja ini, semoga mendapat Ridha dari Allah SWT.

Aceh Besar, 12 Juli 2022 M
2 Dzulhijjah 1442 H

KEPALA SEKRETARIAT
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH



H. Murni, SE.,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19621231 198403 1 028

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	6
1.3. Maksud dan tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA	
SEKRETARIAT MPU ACEH TAHUN 2020	9
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat MPU Tahun 2020 dan Capaian Renstra 2017-2022	10
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat MPU Aceh	15
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat MPU Aceh	19
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPA.....	20
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	21
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	22
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat MPU Aceh	24
3.3. Program dan Kegiatan.....	26
BAB IV PENUTUP	28

DAFTAR LAMPIRAN

- Tabel TC.29. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPA dan Pencapaian Renstra SKPA s.d Tahun 2020
- Tabel TC.30. Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPA
- Tabel TC.31. Rancangan Awal RKPA Tahun 2022
- Tabel TC.32. Usulan Program Dan Kegiatan dari Pada Pemangku Kepentingan/ Masyarakat Tahun 2022
- Tabel TC.33 Rumusan Rancangan Program dan Kegiatan RKPA Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023



BAB I

PENDAHULUAN

- + Latar Belakang,
- + Landasan Hukum,
- + Maksud dan Tujuan
- + Sistematika Penulisan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang dilaksanakan oleh masyarakat. Renja Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Renja Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam peraturan dan perundang-undangan saat ini, penyusunan rencana kerja dikehendaki memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, politis, *bottom-up* dan *top down process*. Ini bermakna bahwa perencanaan daerah selain diharapkan memenuhi kaidah penyusunan rencana kerja yang sistematis, terpadu, transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif,

terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan serta konsisten dengan rencana lainnya yang relevan juga kepemilikan rencana menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Keterlibatan stakeholder dan legislatif dalam proses pengambilan keputusan perencanaan menjadi sangat penting untuk memastikan rencana yang disusun mendapatkan dukungan optimal bagi implementasinya.

Rencana Kerja SKPA mempunyai fungsi penting dan sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah karena Rencana Kerja SKPA adalah perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di pemerintah daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan di peringkat yang lebih atas seperti RKPA, Renstra SKPA, RPJMA dan bahkan RPJPA. Rencana Kerja SKPA berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Rencana Kerja SKPA akan sangat menentukan kualitas pelayanan SKPA yang diberikan kepada masyarakat.

1.1.1. Renja Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh

Majelis Permusyawaratan Ulama merupakan lembaga independen, berkedudukan sejajar dengan Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) berfungsi memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah, meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan serta memberikan nasehat dan bimbingan kepada masyarakat berdasarkan ajaran Islam.

Dalam menjalankan fungsinya MPU memiliki kewenangan dan tugas pokok sebagai berikut :

- a. Memberikan masukan, pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Aceh dan DPRA dalam menetapkan kebijakan berdasarkan Syari'at Islam;
- b. Memberi fatwa, baik diminta maupun tidak diminta, terhadap persoalan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat dan ekonomi sesuai syari'at Islam;
- c. Memberikan arahan terhadap perbedaan pendapat dalam masyarakat tentang masalah keagamaan;
- d. Melakukan penelitian, pengembangan, penerjemahan, penulisan, penerbitan, dan pendokumentasian terhadap naskah-naskah yang berkenaan dengan syari'at Islam;
- e. Melakukan pengkaderan ulama.

Visi :

Terwujudnya Peran Ulama Dalam Pembangunan dan Penerapan Syariat Islam Secara Kaffah.

Misi :

1. Meningkatkan peran MPU dalam memberikan pertimbangan, bimbingan, nasehat, pendapat dan saran dalam penentuan kebijakan daerah, serta pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan daerah.
2. Meningkatkan kegiatan penetapan fatwa/hukum syariat islam.
3. Meningkatkan Sumberdaya dan Peran Ulama.
4. Meningkatkan upaya pelaksanaan syariat islam secara kaffah dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat dan mencegah timbulnya kemungkaran.

5. Meningkatkan kegiatan penyuluhan.

Tujuan :

1. Adanya kepastian hukum syari'at terhadap masalah-masalah yang timbul dalam masyarakat.
2. Lahir kebijakan daerah yang tidak menyimpang dari tuntunan ajaran Islam dalam bidang pemerintahan, kemasyarakatan, pembangunan dan tatanan ekonomi yang Islami.
3. Berjalannya kebijakan daerah sesuai dengan ketentuan syari'at Islam.

Sasaran :

1. Menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan syari'at Islam.
2. Optimalisasi sumber daya dan peranan ulama dalam perumusan kebijakan daerah.
3. Pemantapan uhkawah islamiyah, wathaniyah, insaniyah, dalam beramar makruf dan nahi mungkar.

Kebijakan :

Menetapkan fatwa hukum syari'at, memberikan penyuluhan syari'at kepada masyarakat, memberikan pertimbangan, bimbingan nasehat dan saran kepada Pemerintah Daerah dan DPRA dalam menentukan kebijakan daerah dari aspek syari'at dan memantau pelaksanaan agar tetap sesuai dengan syari'at.

Dalam kerangka inilah Sekretariat MPU menyusun Rencana Kerja Tahun 2022 sebagai suatu proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang akan dicapai dalam satu tahun

anggaran mendatang sesuai arah dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis Sekretariat MPU Aceh Tahun 2017 s/d 2022 dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kepada Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kinerja Sekretariat MPU yang dijadikan acuan sebagai dasar hukum adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
7. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan atas

- Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh;
8. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012-2032;
 9. Qanun Aceh tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2017-2022;
 10. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama;
 11. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 134 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja ini adalah untuk menetapkan Dokumen Perencanaan tahun 2022 yang memuat Kebijakan, Program dan Kegiatan Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Tahun 2022 untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja tahun 2022 ini, agar rumusan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh yang diselaraskan/sinergikan dengan kebijakan pembangunan nasional dan daerah serta mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2022 dengan tema “Membangun Masyarakat yang Berkualitas dan Berdaya Saing Untuk Mewujudkan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif” yang mana Sekretariat MPU Aceh beserta Pimpinan dan anggota MPU dapat berperan serta dalam prioritas pembangunan tahun 2022 diantaranya yaitu Peningkatan

sumber daya manusia berkualitas serta Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Keistimewaan Aceh.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rancangan Akhir Rencana Kerja Sekretariat MPU Aceh Tahun 2022 terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang Rencana Kerja, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan Rencana Kerja Sekretariat MPU Aceh Tahun 2022.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2020

Memuat evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun 2020 dan capaian Rencana Strategis, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat MPU Aceh Tahun 2022.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Menggambarkan telaahan kebijakan nasional, tujuan dan sasaran rencana kerja serta Program dan Kegiatan Sekretariat MPU Aceh Tahun 2022.

BAB V PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun kemungkinan ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

- + *Evaluasi Renja Tahun 2020 dan Capaian Renstra*
 - + *Analisis Kinerja Pelayanan,*
- + *Isu-Isu Penting Penyelenggaraan tugas dan fungsi*
 - + *Review terhadap rancangan awal RKPA*

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT MPU ACEH TAHUN 2020

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2020 dan Renstra Sekretariat MPU Tahun 2017-2022

Rencana Kerja Sekretariat MPU Aceh adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat MPU Aceh ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Sekretariat MPU Aceh selama tahun 2020 dan perkiraan target tahun 2022.

Adapun anggaran Tahun 2020 Sekretariat MPU Aceh sebesar Rp. 16.481.747.283-, dengan 7 (Tujuh) Program dan 33 (Tiga puluh tiga) Kegiatan. Dari jumlah anggaran yang tersedia tersebut dapat terealisasi sebesar Rp. 14.712.378.979,- dengan persentase capaian kinerja keuangan sebesar 89,26% dengan rincian sebagai berikut :

TABEL. 2.1 TABEL REALISASI KEUANGAN 2020

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI		
			KEUANGAN		FISIK
			(Rp)	(%)	(%)
1	2	3	4	5	6
TOTAL BELANJA		16,481,747,283	14,712,378,979	89.26	
BELANJA TIDAK LANGSUNG		6,378,493,359	5,329,725,702	83.56	100.00
BELANJA LANGSUNG		10,103,253,924	9,382,653,277	92.87	100.00
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2,840,753,715	2,475,939,069	87.16	100.00
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12,200,000	4,365,000	35.78	100.00
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	635,811,050	301,873,811	47.48	100.00
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	293,191,824	286,369,798	97.67	100.00
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	152,198,413	152,193,023	100.00	100.00
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	108,366,028	108,322,240	99.96	100.00
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	24,448,161	24,003,000	98.18	100.00
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	50,400,000	50,399,000	100.00	100.00
8	Penyediaan Makanan dan Minuman	95,996,182	94,791,182	98.74	100.00
9	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	48,464,000	47,262,015	97.52	100.00
10	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,419,678,057	1,406,360,000	99.06	100.00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	860,889,317	825,940,326	95.94	100.00
11	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	299,092,737	297,272,000	99.39	100.00
12	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	64,085,035	63,228,500	98.66	100.00
13	Pengadaan Komputer	29,424,194	29,424,000	100.00	100.00
14	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	31,240,000	30,800,000	98.59	100.00
15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	175,912,760	154,377,141	87.76	100.00
16	Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman; Tempat Parkir dan Halaman Kantor	25,781,441	25,770,000	99.96	100.00
17	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	235,353,150	225,068,685	95.63	100.00
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	242,689,280	241,926,000	99.69	100.00
18	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	242,689,280	241,926,000	99.69	100.00
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	31,500,000	27,578,400	87.55	100.00
19	Pendidikan dan Pelatihan Teknis	31,500,000	27,578,400	87.55	100.00
5	Program Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama	5,471,578,618	5,198,552,630	95.01	100.00
20	Pembinaan Badan Otonom MPU	558,290,013	556,923,274	99.76	100.00
21	Sidang Majelis Permusyawaratan Ulama	4,236,112,656	3,997,663,840	94.37	100.00
22	Pendidikan Kader Ulama	38,850,055	29,880,677	76.91	100.00
23	Rapat Koordinasi MPU	49,870,689	49,708,000	99.67	100.00
24	Pengkajian Aliran Sempalan	140,805,340	132,903,539	94.39	100.00
25	Penerbitan Media MPU	256,020,000	254,522,000	99.41	100.00
26	Sosialisasi Fatwa dan Hukum Islam	183,423,865	170,055,500	92.71	100.00
27	Evaluasi Keserasian Pelaksanaan Pembangunan Keagamaan	8,206,000	6,895,800	84.03	100.00
6	Program Koordinasi dan Silaturahmi Umara - Ulama	147,428,632	136,389,750	92.51	100.00
28	Eksistensi Peran Ulama dalam Pembangunan Daerah	147,428,632	136,389,750	92.51	100.00
7	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Agama, Pelayanan Kehidupan Beragama dan Peran Ulama	508,414,362	476,327,102	93.69	100.00
29	Pembinaan Sistem Jaminan Produk Halal	161,318,081	139,282,006	86.34	100.00
30	Pelaksanaan, Penataan dan Pengawasan Produk Halal	210,998,000	206,176,000	97.71	100.00
31	Kerjasama Sistem Jaminan Produk Halal	68,330,442	64,688,357	94.67	100.00
32	Peningkatan Kapasitas Laboratorium Halal	60,252,739	58,680,739	97.39	100.00
33	Sosialisasi Sertifikasi Produk Halal	7,515,100	7,500,000	99.80	100.00

Untuk review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat MPU Aceh Tahun 2020 ditinjau dari capaian program dapat dilihat dalam Tabel T.C.29 terlampir.

2.1.1 Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi keluaran yang direncanakan

Adapun realisasi program/kegiatan Sekretariat MPU Aceh pada tahun 2020 yang tidak memenuhi target yang telah direncanakan adalah program Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama pada Kegiatan **Pendidikan Kader Ulama** dimana alokasi anggaran di Refocusing disebabkan pandemi Covid-19.

2.1.2 Realisasi Program/kegiatan yang telah memenuhi keluaran yang direncanakan.

Adapun realisasi program/kegiatan Sekretariat MPU Aceh pada tahun 2020 yang memenuhi target yang telah direncanakan adalah sebagai berikut :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran

Untuk program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 2.840.753.715,- telah terealisasi sebesar Rp. 2.475.939.069,- atau 87.16%, realisasi fisik sebesar 100 %.

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur;

Untuk program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 860.889.317,- telah terealisasi sebesar Rp. 825.940.326,- atau 95,94%.

3. Program peningkatan disiplin aparatur;

Pada program ini dianggarkan untuk 1 (satu) kegiatan yaitu kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 242.689.280,- telah terealisasi sebesar Rp. 241.926.000,- atau 99.69 %, realisasi fisik sebesar 100%.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Untuk program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 31.500.000,- telah terealisasi sebesar Rp. 27.578.400,- atau 87,55 %.

5. Program peningkatan sumber daya dan peran ulama.

Untuk program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 5.471.578.618,- telah terealisasi sebesar Rp. 5.198.552.630,- atau 95,01%.

6. Program koordinasi dan silaturahmi ulama – umara.

Untuk program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 147.428.632,- telah terealisasi sebesar Rp.136.389.750,- atau 92,51%, realisasi fisik sebesar 100%

7. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Agama, Pelayanan Kehidupan Beragama dan Peran Ulama

Untuk program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 508.414.362,- telah terealisasi sebesar Rp. 476.327.102,- atau 93,69%

2.1.3 Realisasi Program/kegiatan yang melebihi keluaran yang direncanakan.

Terdapat pada program peningkatan sumber daya dan peran ulama dengan Kegiatan **Sidang Majelis Permusyawaratan Ulama** dan Kegiatan **Pelaksanaan, Penataan dan Pengawasan Produk Halal**.

2.1.4 Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja Program/kegiatan

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2020, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat MPU Aceh sebagai berikut :

1. Terjadinya Pandemi Covid-19;
2. Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra maupun dalam RPJMA dalam merencanakan kegiatan.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Sekretariat MPU Aceh dalam pelaksanaan urusan Pemerintahan Bidang Keagamaan, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

2.1.5 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian kinerja antara lain:

1. Meningkatnya Kualitas serta kuantitas fatwa dan taushiah.
2. Meningkatnya jumlah sertifikat produk halal.

2.1.6 Perkiraan Capaian Tahun 2021

Rencana Kerja yang telah ditetapkan Tahun 2021 pada Sekretariat MPU Aceh terdapat 2 (dua) Program, 9 (sembilan) Kegiatan serta 27 (dua puluh tujuh) sub kegiatan dengan jumlah pagu Rp. 21.206.797.134,- dengan 2 (dua) jenis Belanja yaitu Belanja Operasi sebesar Rp. 19.938.189.016,- dan Belanja Modal Rp. 1.258.608.117,-. Diperkirakan dapat terlaksana dan terealisasi sebesar 96,28 %.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat MPU Aceh

2.2.1 Kajian terhadap capaian kinerja

Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh telah memenuhi target kinerja pertama. Dalam pelaksanaan kegiatan MPU Aceh berhasil meningkatkan umlah fatwa, keputusan, himbauan, taushiah yang ditetapkan sesuai ketentuan syariat Islam dimana target kuantitas Fatwa/Tausyiah sebanyak 7 dokumen dapat terealisasi sebanyak 13 dokumen, sebagai berikut :

Tabel 2.2 Jumlah fatwa dan keputusan yang ditetapkan Sesuai ketentuan syariat Islam

No.	Nomor dan Tanggal Produk Hukum	Tentang	Jenis Produk Hukum
1	1 Tahun 2020 Tanggal 12 Februari 2020	Pengangkatan Anak (adopsi) Menurut Perspektif Fiqh Islam	FATWA
2	2 Tahun 2020 Tanggal 11 Maret 2020	Dampak Negatif Penafsiran Al-Quran Secara Liberal	FATWA
3	3 Tahun 2020 Tanggal 17 Juni 2020	Pembatasan Sosial Berskala Besar Menurut Perspektif Syariat Islam	FATWA
4	4 Tahun 2020 Tanggal 23 Juli 2020	Tajhiz Mayat Covid-19 Menurut Tinjauan Fiqh	FATWA
5	5 Tahun 2020 Tanggal 8 Oktober 2020	Pemeliharaan Cagar Budaya Dalam Perspektif Syariat Islam	FATWA
6	1 Tahun 2020 Tanggal 16 Maret 2020	Penangkalan dan Pencegahan Wabah Penyakit	Tausyiah
7	3 Tahun 2020 Tanggal 24 Maret 2020	Penanganan Pasien Wabah Penyakit	Tausyiah
8	4 Tahun 2020 Tanggal 31 Maret 2020	Pelaksanaan Ibadah Dan Kegiatan Sosial Keagamaan Lainnya Dalam Kondisi Darurat	Tausyiah
9	5 Tahun 2020 Tanggal 21 April 2020	Tata Cara Pelaksanaan Ibadah Bulan Ramadhan dan Kegiatan Keagamaan lainnya Tahun 1441 H	Tausyiah
10	6 Tahun 2020 Tanggal 29 September 2020	Tata Cara Pelaksanaan Ibadah Idul Adha, Penyembelihan Hewan Qurban dan Kegiatan Keagamaan lainnya Tahun 1441 H	Tausyiah
11	7 Tahun 2020 Tanggal 29 September 2020	Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf Indonesia (MPTT-I)	Tausyiah
12	8 Tahun 2020 Tanggal 21 Desember 2020	Pendirian Rumah Ibadah	Tausyiah
13	9 Tahun 2020 Tanggal 21 Desember 2020	Lembaga Keuangan Syariah	Tausyiah

Terdapat dua sasaran strategis Sekretariat MPU Aceh pada Tahun 2020 yang akuntabilitasnya mencapai 100%. Kegiatan yang menunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja sebagai berikut : Sasaran strategis pertama yaitu meningkatnya Sertifikasi jaminan halal yang mana pada Tahun 2020 jumlah pemohon sertifikasi halal dari perusahaan mencapai 350 permohonan, hal ini disebabkan

meningkatnya kesadaran para pelaku usaha tentang pentingnya sertifikat halal untuk produk yang dihasilkan. Peningkatan kesadaran ini tidak lepas dari sosialisasi pentingnya sertifikasi halal yang dilakukan oleh LPPOM MPU Aceh dan Instansi terkait lainnya kepada masyarakat.

Pada tahun 2020 LPPOM MPU Aceh telah menerbitkan 150 sertifikat halal dari target 100 sertifikat halal. Keberhasilan ini didukung oleh salah satu point penting dari SOP tersebut yaitu proses bimbingan sertifikasi halal terhadap pengusaha yang bermohon disertifikasi sebelum proses audit halal dilakukan. Bimbingan ini memberikan pemahaman lebih lanjut kepada pengusaha sehingga sebelum auditor turun kelapangan, pihak perusahaan sudah benar-benar siap menghadapi auditor halal.

Tabel 2.3

Sasaran Pertama Perbandingan tingkat capaian kinerja beberapa tahun yang lalu

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi		
			Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1	Meningkatnya kualitas, kuantitas fatwa, taushiah dan sertifikasi produk halal	Jumlah fatwa dan taushiah yang ditetapkan sesuai ketentuan syariat Islam	9 Dokumen	7 Dokumen	13 Dokumen
		Jumlah sertifikat produk halal yang diterbitkan	172 Sertifikat	184 Sertifikat	150 Sertifikat
2	Meningkatnya jumlah kader ulama dalam kehidupan masyarakat Aceh	Jumlah Kader Ulama Yang Ditingkatkan Kompetensinya	284 Orang	72 Orang	0 Orang

Sasaran Strategis kedua yaitu meningkatnya jumlah kader ulama dalam kehidupan masyarakat aceh, pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui 1 indikator kinerja yaitu : Jumlah Kader Ulama yang ditingkatkan kompetensinya. Pada tahun 2020 Penyelenggaraan Pendidikan Kader Ulama tidak dapat

dilaksanakan sebagaimana mestinya dikarenakan pandemi Covid-19 yang mana anggaran untuk Kegiatan Pendidikan Kader Ulama telah di Refocusing.

Tabel 2.4

Sasaran Kedua Perbandingan tingkat capaian kinerja beberapa tahun yang lalu

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi		
			Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1	Meningkatnya jumlah kader ulama dalam kehidupan masyarakat Aceh	Jumlah Kader Ulama Yang Ditingkatkan Kompetensinya	284 Orang	72 Orang	0 Orang

2.2.2. Tabel Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Secara umum analisis kinerja pelayanan Sekretariat MPU Aceh, target yang ditetapkan dalam kegiatan-kegiatan yang direncanakan secara tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, telah dilaksanakan secara optimal. Hal ini terlihat dari jumlah alokasi dana dan realisasi anggaran setiap tahunnya, dapat diserap sesuai target yang ditetapkan secara penuh.

Terdapat beberapa kegiatan yang tidak berlanjut dan rumusan indikator output dan outcome yang belum sempurna dirumuskan, sehingga bila dilakukan penghitungan persentase menjadi suatu kendala tersendiri. Secara lebih terperinci pencapaian kinerja pelayanan Sekretariat MPU Aceh dapat lihat sebagaimana formulir T.C.30 terlampir.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh

Pembentukan Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 134 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh yang didalamnya mengatur Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, sehingga fungsi pelayanan terhadap Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dapat terlaksana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi MPU dalam penetapan Program dan Kegiatan Prioritas sebagai :

1. Masih kurangnya Pemahaman terhadap aliran keagamaan yang bertentangan dengan Ahlul Sunnah Wal Jamaah, maka perlu dilakukan Pembekalan Pencegahan Pendangkalan Aqidah.
2. Tidak tersampainya secara menyeluruh terhadap fatwa-fatwa dan tausyiah yang telah ditetapkan kepada masyarakat, maka diperlukan kegiatan Sosialisasi Fatwa dan Hukum Islam.
3. Masih kurangnya kader-kader ulama yang potensial baik itu dari kalangan laki-laki dan perempuan, maka diperlukan kegiatan Pendidikan Kader Ulama.
4. Masih kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam mengurus sertifikasi Halal pada produk makanan, obat-obatan dan kosmetika, maka untuk itu diperlukan sosialisasi sistem jaminan produk halal.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPA

Review terhadap rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Aceh RKPA Tahun 2022 dimaksudkan untuk memperoleh rumusan hasil analisis kebutuhan Program/Kegiatan pada Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh yang terdiri dari 2 (dua) Program serta 10 (sepuluh) Kegiatan. Yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
 1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 5. Pemeliharaan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 6. Pengadaan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Program Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh
 1. Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama
 2. Silaturahmi Ulama- Ulama
 3. Peningkatan Kualitas Kelembagaan Agama, Pelayanan Kehidupan Beragama dan Peran Ulama

Review terhadap Rancangan Awal RKPA tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel T.C. 31 terlampir.



BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- ✚ *Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional*
- ✚ *Tujuan dan Sasaran Renja*
- ✚ *Program Kegiatan*

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting. RPJMN 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (upper-middle income country/MIC) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke IV tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005-2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir. Keempat pilar tersebut yaitu :

1. Kelembagaan politik dan hukum yang mantap
2. Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat
3. Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh
4. Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga

Yang diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan yang didalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas. Yang terdiri dari :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Mengacu pada 7 agenda pembangunan nasional tersebut dan salahsatu agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2025 adalah Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa, terdapat 4 (empat) kesesuaian yang menjadi tugas MPU Aceh, yaitu :

1. Menetapkan fatwa hukum syari'at;
2. Memberikan penyuluhan syari'at kepada masyarakat;
3. Memberikan pertimbangan, bimbingan nasehat dan saran kepada Pemerintah Daerah dan DPRA dalam menentukan kebijakan daerah dari aspek syari'at;
4. Memantau pelaksanaan pembangunan agar tetap sesuai dengan syari'at.

3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Sejretariat MPU Aceh

3.2.1 Uraian tentang perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Sekretariat majelis Permusyawaratan Ulama Aceh.

➤ Tujuan Rencana Kinerja

Penyusunan Rencana Kinerja bertujuan untuk merumuskan kembali komitmen MPU Aceh dalam melaksanakan program dan kegiatan demi pencapaian sasaran yang telah tersedia dalam Renstra Sekretariat MPU Aceh Tahun 2017 – 2022, guna menentukan arah dalam penetapan prioritas program dan kegiatan tahun 2022 yang dapat menjadi acuan dalam penyusunan dan pengajuan anggaran yang berbasis kinerja.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kinerja adalah untuk menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai ruang lingkup tugas dan fungsi dalam rangka mewujudkan sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2022.

Dalam kurun waktu 1 s/d 5 tahun, penjabaran/implementasi misi diarahkan pada pencapaian tujuan tertentu. Adapun tujuan tersebut berupa :

1. Meningkatnya peran MPU dalam memberikan pertimbangan, bimbingan, nasehat, pendapat dan

saran dalam penentuan kebijakan daerah, serta pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan daerah.

2. Meningkatnya kegiatan penetapan fatwa/hukum Syariat Islam.
3. Meningkatnya Sumber Daya dan Peran Ulama.
4. Meningkatnya pelaksanaan syariat islam secara kaffah dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat dan mencegah timbulnya kemungkar.
5. Meningkatnya kegiatan penyuluhan dan sosialisasi.
6. Meningkatnya kesadaran masyarakat (pelaku usaha) dalam mengurus sertifikasi halal.

➤ Sasaran Rencana Kinerja

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Sekretariat MPU Aceh juga mempunyai beberapa sasaran yang akan dilaksanakan, yaitu :

- a. Menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan syari'at Islam dalam semua aspek kehidupan sehari-hari.
- b. Teroptimalisasinya sumber daya dan peranan ulama dalam perumusan kebijakan dan pembangunan daerah yang terkait dengan syariat islam.
- c. Pemantapan uhkawah islamiyah, wathaniyah, insaniyah, dalam beramar makruf dan nahi mungkar.

3.3 Program dan Kegiatan

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat MPU Aceh Tahun 2022 terdiri dari Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang disusun berdasarkan Isu Strategis dan Arah kebijakan Pembangunan Aceh dalam rangka Peningkatan Kapasitas dan Peran Ulama dalam Pembangunan Aceh serta mengacu pada evaluasi program/kegiatan Tahun 2020.

Dalam penyusunan rencana kerja pelaksanaan program dan kegiatan pada Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh didukung sepenuhnya oleh Pimpinan dan anggota MPU Aceh. Sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan, adapun Program dan Kegiatan pada Sekretariat MPU Aceh Tahun 2022 sebagai berikut :

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	4. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	5. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	7. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	8. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
	10. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	11. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	12. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

	13. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	14. Pengadaan Mebel
	15. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	16. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	17. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	18. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
II.	PROGRAM MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU) ACEH
1.	Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama
	19. Pembinaan Badan Otonom Majelis Permusyawaratan Ulama
	20. Sidang Majelis Permusyawaratan Ulama
	21. Pendidikan Kader Ulama
	22. Rapat Koordinasi Permusyawaratan Ulama
	23. Pengkajian Aliran Sempalan
	24. Penterjemahan Kitab Berbahasa Arab dan Penggandaannya
	25. Penerbitan Media Majelis Permusyawaratan Ulama
	26. Sosialisasi Fatwa dan Hukum Islam
	27. Evaluasi Keserasian Pelaksanaan Pembangunan Keagamaan
2.	Silaturahmi Ulama-Ulama
	28. Eksistensi Peran Ulama dalam Pembangunan Daerah
3.	Peningkatan Kualitas Kelembagaan Agama, Pelayanan Kehidupan Beragama dan Peran Ulama
	29. Pembinaan Sistem Jaminan Produk Halal
	30. Pelaksanaan, Penataan dan Pengawasan Produk Halal
	31. Kerjasama Sistem Jaminan Produk Halal
	32. Peningkatan Kapasitas Laboratorium Halal
	33. Sosialisasi Sertifikasi Produk Halal

Dalam perencanaan Tahun 2022, Sekretariat MPU Aceh telah menetapkan Program/Kegiatan prioritas yang diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan dalam Peningkatan dan Peran Ulama di Aceh. Rencana Kerja (Renja) Sekretariat MPU Aceh Tahun 2022 lebih detail dapat dilihat pada Tabel T.C.33 terlampir.



BAB IV

PENUTUP

BAB IV

P E N U T U P

Rancangan Akhir Rencana Kinerja (Renja) Sekretariat MPU Aceh Tahun 2022 yang telah disusun merupakan penjabaran dari Renstra yang berisikan Program dan Kegiatan serta Pagu Indikatif yang direncanakan guna mendukung pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan RKP tahun 2022 dengan Tema "Membangun Masyarakat yang Berkualitas dan Berdaya Saing Untuk Mewujudkan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif" agar dapat terlaksana secara optimal, sehingga memberikan dampak positif terhadap Peningkatan dan Peran Ulama Dalam Pembangunan Aceh dalam rangka Penyelenggaraan Urusan Bidang Keistimewaan dan Kekhususan Aceh.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Sekretariat MPU Aceh kami susun dan sampaikan, semoga dapat dijadikan sebagai bahan penetapan Rencana Kinerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2022.

Aceh Besar, 12 J u l i 2021 M
2 Dzulhijjah 1442 H

KEPALA SEKRETARIAT
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH



H. Murni, SE., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19621231 198403 1 028

